

Berita : Pajak Reklame dan PBB Merosot  
Entitas / Cakupan : Kota Tasikmalaya  
Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/Hal.15  
Edisi : Selasa, 23 Januari 2018

# Pajak Reklame dan PBB Merosot

## Pembongkaran Papan Reklame Dikeluhkan Pengusaha

**TASIKMALAYA, (PR).-**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya mencatat terjadi penurunan pendapatan pajak reklame selama 2017. Dari target Rp 3,09 miliar, Kota Tasikmalaya hanya mampu merealisasikan pajak reklame sebesar Rp 2,9 miliar atau menurun 95,6 persen.

Selain pajak reklame, penurunan juga terjadi di dua sektor lainnya yakni pajak bumi bangunan (menurun 82 persen) dan pajak mineral bukan logam (menurun 86 persen).

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Ronny Mulyadi mengatakan, pendapatan pajak reklame mengalami kemunduran karena para pengusaha reklame diresahkan dengan penertiban reklame ilegal di Kota Tasikmalaya.

Sebelumnya, meskipun ilegal, Pemkot Tasikmalaya tetap menarik pajak reklame, sehingga pendapatan pajak reklame selalu melampaui target.

"Pajak reklame ini mengalami kemunduran, mohon menjadi bahan pertimbangan ke depan terkait kebijakan reklame. Pembongkaran ini dirasa berat oleh pengusaha karena ada kaitan juga dengan sewa lahan. Jadi perlu dikaji ulang," kata Ronny dalam Rapat Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2017 di Aula Balai Kota Tasikmalaya, Senin (22/1/2018).

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengakui, ada penurunan pendapatan pajak di tiga sektor tersebut. Kendati demikian, pencapaian pajak secara keseluruhan mengalami kenaikan.

"Reklame turun 95 persen alasannya karena banyak yang kita bongkar, mineral bukan logam turun karena pada 2017 banyak tambang yang ditutup Jabar, perizinannya kan di sana.

Nah, untuk PBB ini jadi PR kami, biasanya ya tidak bayar karena sedang tidak ada di Tasikmalaya. Ini kita kejar terus," kata Budi.

### Ilegal

Kaitan dengan penurunan pajak reklame karena pembongkaran reklame ilegal, Budi mengaku tetap tidak akan mengkaji ulang peraturan tersebut. Menurut Budi, reklame ilegal tetap akan ditertibkan sambil menata ulang titik reklame agar sesuai dengan tata estetika di wilayah Kota Tasikmalaya.

"Bongkar saja tidak apa-apa, yang enggak berizin memang harus ditertibkan. Kami sedang dalam masa penertiban, nanti juga akan ada potensi pajak baru kalau sudah ditata," kata Budi.

Kepala Seksi Reklame Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hery Nugraha mengatakan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2/2016 tentang Reklame, mulai tahun

2018, Pemkot Tasikmalaya akan menetapkan kuota reklame di titik yang sudah ditentukan. Penentuan titik juga dilakukan dengan menggunakan sistem koordinat.

"Di Jalan HZ itu sudah kelebihan kapasitas, untuk reklame seharusnya dibatasi sepanjang jalan itu ya maksimal 20 reklame. Nantinya, pemkot tidak akan memberikan rekomendasi untuk reklame baru. Jadi hanya boleh memperpanjang izinnya," ucap Hery.

Hery menyebutkan, saat ini total reklame di Kota Tasikmalaya mencapai ribuan. Jumlah tersebut termasuk reklame *billboard*, hingga reklame insidental. Dari ribuan reklame yang ada di Kota Tasikmalaya, hanya 300 yang mengajukan izin penyelenggaraan reklame.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Tasikmalaya sejak awal Januari 2018 melakukan penertiban reklame. Belasan reklame pun disegel. (Windiyati Retno Sumardiyani)\*\*\*